

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. Bali Dalam Angka 2015. Denpasar
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar 2015, Sejarah/Kronologi Kawasan Hutan Provinsi Bali s/d Tahun 2015. Denpasar
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar 2015, Data Perkembangan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Provinsi Bali s/d Tahun 2015. Denpasar.
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar 2015, Data Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Bali s/d Tahun 2015. Denpasar
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar 2015, Data Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan Provinsi Bali s/d Tahun 2015. Denpasar.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Departemen Kehutanan. 1999. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 433/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali , Seluas 130.686,01 (Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam, Satu PERSERATUS) Hektar. Jakarta
- Departemen Kehutanan. 1999. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 433/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Tingkat I Bali seluas 130.686,01 Ha. Jakarta
- Departemen Kehutanan. 1986. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 369/Kpts-II/1986 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Bunutan (RTK.23) seluas ±126,70 Ha di DATI II Karangasem, DATI I Bali seperti tercantum dalam Berita Acara Tata Batas Hutan Lindung Bunutan. Jakarta: 24 Nopember 1986.
- Departemen Kehutanan. 1988. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 067/Kpts-II/88 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Prapat Bena (RTK.10) seluas 1.392 Ha di Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Dati I Bali. Jakarta: 15 Pebruari 1988.

- Departemen Kehutanan. 1989. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 136/Kpts-II/1989 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Bukit Gumang (RTK.24) seluas 22,00 Ha. Jakarta: 23 Maret 1989.
- Departemen Kehutanan. 1991. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 247/Kpts-II/1991 Tentang Penetapan Perluasan Kelompok hutan Gunung Agung (RTK.8) seluas 436,10 Ha yang terletak diwilayah kecamatan Rendang dan Kecamatan Kubu, Daerah Tingkat II Karang Asem serta Areal Hutan Bukit Pawon (RTK.25) seluas 35 Ha, yang terletak dikecamatan Bebandem, Daerah Tingkat II Karang Asem, Provinsi Dati I Bali, sebagai Kawasan hutan dengan Fungsi Lindung. Jakarta: 6 Mei 1991.
- Departemen Kehutanan. 1993. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 191/Kpts-II/93 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Bakung (RTK.27a, 27b dan 27c) yang terletak dikabupaten Daerah Tingkat II, Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 244 (Dua ratus empat puluh empat) Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi. Jakarta: 27 Pebruari 1993.
- Departemen Kehutanan. 1995. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 535/Kpts-II/1995 Tentang Penetapan kelompok hutan Gunung Abang Agung (RTK.8) seluas 62,5 (enam puluh dua lima persepuluh) Hektar yang terletak di Daerah Tingkat II, Karang asem, Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lindung. Jakarta: 5 Oktober 1995.
- Departemen Kehutanan. 1995. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 616/Kpts-II/1995 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Penulisan Kintamani (RTK.20), terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 5.822,65 (Lima ribu delapan ratus dua puluh dua dan enam puluh lima perseratus) Hektar yang terdiri dari seluas 4.192,7 (Empat ribu seratus sembilan puluh dua dan tujuh persepuluh) Hektar di Kabupaten Daaerah Tingkat II Bangli, sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi Terbatas dan seluas 1.629,95 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan dan Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Lindung. Jakarta: 16 November 1995.
- Departemen Kehutanan. 1996. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 144/Kpts-II/1996 Tentang Penetapan sebagian Kawasan Hutan Batukau (RTK.4) yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, seluas 1.336,5 Hektar sebagai Taman Wisata

Alam dengan Taman Wisata Alam Danau Buyan – Danau Tamblingan. Jakarta: 4 April 1996.

Departemen Kehutanan. 1996. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 759/Kpts-II/1996 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Suana (RTK.28A, 28B, 28C, dan 28D) yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, seluas 329,50 (Tiga ratus dua puluh Sembilan dan lima puluh perseratus) Hektar, sebagai kawasan hutan tetap. Jakarta: 12 Desember 1996.

Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2004. Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Bali tahun 2004. Denpasar.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.99/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Puncak Landep (RTK.1) seluas 590 Hektar yang terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jakarta: 28 Januari 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.100/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Gunung Mungsu (RTK.2) seluas 1.134 Hektar yang terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jakarta: 29 Januari 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.172/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Nusa Lembongan (RTK.22) seluas 202 (Dua ratus dua) Hektar yang terletak di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Jakarta: 19 Pebruari 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.203/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Kawasan Taman Wisata Alam Sangeh (RTK.21) seluas 13,91 (Tiga belas dan Sembilan puluh satu perseratus) Hektar di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Jakarta: 3 Maret 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.204/Menhut-II/2014 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Batur-Bukit Payang (RTK.7) seluas 2.528 Hektar dengan fungsi kawasan Taman Wisata Alam seluas 2.075 Hektar dan kawasan hutan produksi terbatas seluas 453 Hektar, yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Jakarta: 3 Maret 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2551/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Silangjana (RTK.3) seluas 415 (Empat

Ratus Lima Belas) Hektar di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jakarta: 7 April 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2552/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah (RTK.12) seluas 4.686,30 (Empat ribu enam ratus delapan puluh enam dan tiga puluh perseratus) Hektar di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Jakarta: 7 April 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2553/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Yeh Ayah (RTK.11) seluas 575,73 (Lima ratus tujuh puluh lima dan tujuh puluh tiga perseratus) Hektar di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Jakarta: 7 April 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2554/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Gunung Seraya (RTK.9) seluas 1.111 (Seribu seratus sebelas) Hektar di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Jakarta: 7 April 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2555/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Munduk Pengajaran (RTK.5) selua 613 (Enam ratus tiga belas) Hektar di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Jakarta: 7 April 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2846/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK.8) seluas 14.857,17 (Empat belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh dan tujuh belas perseratus) Hektar di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Jakarta: 16 April 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2847/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Gunung Batukau (RTK.4) seluas 15.102,90 (Lima belas ribu seratus dua dan Sembilan puluh per seratus) Hektar di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jakarta: 16 April 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2848/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Budeng (RTK.30) seluas 66,99

(Enam puluh enam dan sembilan puluh sembilan perseratus) Hektar di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Jakarta: 16 April 2014.

Kementerian Kehutanan. 2014. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.2849/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19) seluas 86.649,84 (Delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh Sembilan dan delapan puluh empat perseratus) Hektar di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Jakarta: 16 April 2014.

U.S. Army Map Service. 1954. *Topographic Maps Series T 503, Edition 1-AMS (First Printing, 6-59) SC 501, Scale 1 : 250.000*, Singaradja.